

5 STRATEGI IMPLEMENTASI RAD-GRK

Aksi mitigasi dalam rangka pengurangan emisi GRK di Provinsi Papua di fokuskan pada 2 (dua) sektor yaitu sektor pertanian dan serta kehutanan dan lahan. Untuk dapat mengimplementasikan aksi mitigasi yang direncanakan maka perlu dilakukan pemetaan kelembagaan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan berperan. Pemetaan kelembagaan ini bertujuan agar setiap stakeholders dapat berkontribusi maksimal di dalam aksi mitigasi. selain itu, pemetaan juga bertujuan untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan akses pendanaan yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aksi mitigasi. dengan adanya pemetaan kelembagaan maka diharapkan juga terjadi distribusi tanggung jawab antar setiap stakeholders. Selain itu, pemetaan kelembagaan juga diharapkan dapat mendeskripsikan tata waktu pelaksanaan aksi mitigasi oleh masing-masing stakeholders serta kemungkinan kendala-kendala yang akan dihadapi serta solusi yang akan ditempuh.

5.1. Pemetaan Kelembagaan

5.1.1. Pemetaan Kelembagaan Sektor Pertanian

Tabel 5.1. Pemetaan kelembagaan aksi mitigasi sektor pertanian

No.	Aksi Mitigasi	Lembaga Terkait
1	Pembuatan biogas	BAPPEDA, Dinas Pertanian dan Peternakan, BAKORLUH dan Bahan Ketahanan Pangan
2.	Pengurangan Pupuk anorganik	BAPPEDA, Dinas Pertanian dan Peternakan, BAKORLUH dan Bahan Ketahanan Pangan

LAPORAN AKHIR

5.1.2. Pemetaan Kelembagaan Aksi Mitigasi Sektor Kehutanan dan Lahan

Tabel 5.2. Pemetaan Kelembagaan Aksi Mitigasi Sektor Kehutanan dan Lahan

No.	Aksi Mitigasi	Lembaga Terkait
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Dinas Kehutanan dan Konservasi, BPDAS Mamberamo, Swasta
2.	Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat	Dinas Kehutanan dan Konservasi, BP2HP, Swasta
3.	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	Dinas Kehutanan dan Konservasi, BPDAS Mamberamo, Swasta
4.	Pembangunan HTI	Dinas Kehutanan dan Konservasi, BPKH, Swasta
5.	Restorasi Ekosistem Hutan	Dinas Kehutanan dan Konservasi, BPKH, Swasta
6.	Pencegahan Perambahan Hutan	Bappeda, Dinas Kehutanan dan Konservasi, BKSDA, Swasta
7.	Pengurangan Perizinan Jatah Tebangan Tahunan (JTT) berdasarkan kemampuan produksi RKT berjalan	Dinas Kehutanan dan Konservasi, BP2HP, Swasta
8.	Implementasi <i>Reduced Impact Logging</i> (RIL) dalam rangka sertifikasi PHPL dan SVLK	Dinas Kehutanan dan Konservasi, BP2HP, Swasta.
9.	Pencegahan Konversi Hutan	Bappeda, Dinas Kehutanan dan Konservasi, BKSDA, Swasta
10.	Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat	Dinas Kehutanan dan Konservasi, BP2HP, BPKH, Swasta

5.1.3. Pemetaan Kelembagaan Sektor Limbah/Sampah

Tabel 5.3. Pemetaan kelembagaan aksi mitigasi sektor pertanian

No.	Aksi Mitigasi	Lembaga Terkait
1	Penyusunan Master Plan Pengelolaan Sampah di 28 Kabupaten	BAPPEDA, Dinas Kebersihan dan Tata Kota, Badan Lingkungan Hidup
2.	Penyusunan Studi Kelayakan TPA di 29 Kabupaten/Kota	BAPPEDA, Dinas Kebersihan dan Tata Kota, Badan Lingkungan Hidup
3.	Penyusunan AMDAL di TPA 29 Kabupaten/Kota	BAPPEDA, Dinas Kebersihan dan Tata Kota, Badan Lingkungan Hidup
4.	Perencanaan Teknik TPST 3R di 29 Kabupaten/Kota	BAPPEDA, Dinas Kebersihan dan Tata Kota, Badan Lingkungan Hidup

5.2. Identifikasi Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan untuk mengimplementasikan RAD-GRK dapat berasal dari berbagai pendanaan dalam negeri maupun dari bantuan luar negeri. Pendanaan dalam negeri bersumber dari APBN, APBD dan peran serta sector swasta. Sedangkan pendanaan luar negeri dapat bersumber dari kerjasama bilateral, multilateral dengan negara pendonor dan pasar karbon.

a. Sumber Pendanaan Dalam Negeri

Kebijakan pendanaan untuk mendukung komitmen penurunan emisi GRK secara sukarela merupakan bagian dari kebijakan yang telah ditetapkan di dalam RPJMN 2010-2014. Dengan demikian, isu perubahan iklim telah mendapatkan prioritas pendanaan melalui mekanisme APBN. Program-program penurunan emisi GRK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari program pembangunan nasional dengan adaptasi dampak dari perubahan iklim, sehingga tidak bersifat eksklusif.

Sebagian besar kegiatan penurunan emisi GRK akan dilaksanakan oleh daerah, oleh karena itu pembiayaannya harus diintegrasikan dengan program-program pemerintah daerah yang dibiayai melalui APBD. Selain itu pendanaan kegiatan penurunan emisi GRK dapat juga bersumber dari sektor swasta. Sumber dana potensial lain untuk menangani perubahan iklim adalah hibah dalam negeri (dari sektor swasta dan masyarakat) yang dikelola oleh pemerintah. Pemerintah akan membuat pengaturan dan mekanisme yang memudahkan pemberi hibah dalam menyalurkan dana tersebut. Beberapa sumber dana swasta dalam negeri yang diharapkan dapat membiayai kegiatan penurunan emisi GRK berasal dari perbankan, non perbankan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari berbagai perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Sumber Pendanaan Luar Negeri

Pembiayaan program penurunan emisi GRK yang bersumber dari luar negeri terdiri dari kerjasama bilateral maupun multilateral serta pasar karbon. Pemanfaatan dana pinjaman yang bersumber dari luar negeri ini sedapat mungkin tidak memberikan beban yang berlebihan bagi keuangan negara. Sedangkan dana yang bersumber dari pasar

LAPORAN AKHIR

karbon (*carbon trade*) bisa dalam bentuk dana REDD+ ataupun dana yang bersumber dari *Voluntary Market*.

5.2.1. Identifikasi Sumber Pendanaan Aksi Mitigasi Sektor Pertanian

Tabel 5.4. Identifikasi sumber pendanaan aksi mitigasi sektor pertanian

No.	Aksi Mitigasi	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	Pembuatan biogas	APBD, APBN, Bantuan luar negeri, Swasta	Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi lokal
2.	Pengurangan Pupuk anorganik	APBD, Swasta	Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan pupuk yang berasal dari sumber-sumber alami

5.2.2. Identifikasi Sumber Pendanaan Aksi Mitigasi Sektor Kehutanan dan Lahan

Tabel 5.5. Identifikasi sumber pendanaan aksi mitigasi sektor kehutanan dan lahan

No.	Aksi Mitigasi	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	APBD, APBN, Swasta	Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi luas lahan kritis
2.	Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat	APBD, APBN, Swasta, Bantuan Luar Negeri	Kegiatan ini dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pada wilayah tidak produktif di dalam kawasan hutan
3.	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	APBD, APBN, Swasta	Kegiatan ini dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pada wilayah tidak produktif di dalam kawasan hutan
4.	Pembangunan HTI	APBD, APBN, Swasta	Kegiatan ini dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pada wilayah tidak produktif di dalam dan di luar kawasan hutan
5.	Restorasi Ekosistem Hutan	APBD, APBN, Swasta	Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan serapan karbon pada LOA
6.	Pencegahan Perambahan Hutan	APBD, APBN, Bantuan luar negeri	Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi pembukaan lahan akibat perambahan

LAPORAN AKHIR

7.	Pengurangan Perizinan Jatah Tahunan berdasarkan kemampuan produksi RKT berjalan	Perizinan Tebangan (JTT)	APBD, Swasta	APBN,	Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan pengelolaan hutan lestari oleh pemegang IUPHHK berdasarkan kapasitas produksi
8.	Implementasi <i>Reduced Impact Logging</i> (RIL) dalam rangka sertifikasi PHPL dan SVLK		APBD, Swasta	APBN,	Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi kerusakan tegakan tinggal
9.	Pencegahan Konversi Hutan		APBD, Swasta	APBN,	Kegiatan ini dilakukan untuk menekan laju konversi hutan
10.	Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat		APBD, Swasta	APBN,	Kegiatan ini dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pada wilayah tidak produktif di dalam dan di luar kawasan hutan

5.2.3. Identifikasi Sumber Pendanaan Aksi Mitigasi Sektor Limbah/Sampah

Tabel 5.6. Pemetaan kelembagaan aksi mitigasi sektor pertanian

No.	Aksi Mitigasi				
1	Penyusunan Master Plan Pengelolaan Sampah di 28 Kabupaten		APBD, Swasta	APBN,	Kegiatan ini dilakukan untuk membangun rencana induk pengelolaan sampah
2.	Penyusunan Studi Kelayakan TPA di 29 Kabupaten/Kota		APBD, Swasta	APBN,	Kegiatan ini bertujuan untuk melihat kelayakan TPA
3.	Penyusunan AMDAL di TPA 29 Kabupaten/Kota		APBD, Swasta	APBN,	Kegiatan ini dilakukan untuk melihat AMDAL TPA
4.	Perencanaan Teknik TPST 3R di 29 Kabupaten/Kota		APBD, Swasta	APBN,	Kegiatan ini untuk membangun inovasi pengelolaan sampah



LAPORAN AKHIR

5.3. Penyusunan Jadwal Implementasi

Tabel 5.7. Jadwal implementasi RAD GRK Provinsi Papua.

No.	Aksi Mitigasi	Tahun							
		13	14	15	16	17	18	19	20
Sektor Pertanian									
1.	Pembuatan biogas								
2.	Pengurangan Pupuk anorganik								
Sektor Kehutanan dan Lahan									
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan								
2.	Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat								
3.	Hutan Kemasyarakatan (HKm)								
4.	Pembangunan HTI								
5.	Restorasi Ekosistem Hutan								
6.	Pencegahan Perambahan Hutan								
7.	Pengurangan Perizinan Jatah Tebang Tahunan (JTT) berdasarkan kemampuan produksi RKT berjalan								
8.	Implementasi <i>Reduced Impact Logging</i> (RIL) dalam rangka sertifikasi PHPL dan SVLK								
9.	Pencegahan Konversi Hutan								
10.	Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat								
Sektor Limbah/Sampah									
1	Penyusunan Master Plan Pengelolaan Sampah di 28 Kabupaten								
2.	Penyusunan Studi Kelayakan TPA di 29 Kabupaten/Kota								
3.	Penyusunan AMDAL di TPA 29 Kabupaten/Kota								
4.	Perencanaan Teknik TPST 3R di 29 Kabupaten/Kota								